

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE CAPACITY AND SIPD ON FINANCIAL MANAGEMENT

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SIPD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN

Muji Cahyo Wijaya¹, Ati Retna Sari², Mochamad Fariz Irianto³
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang^{1,2,3}
mujicahyowijaya94@gmail.com¹, atiretnasari@unikama.ac.id²,
mochamadfarizirianto@unikama.ac.id³

ABSTRACT

Quality financial management in local governments requires competent human resources and integrated information systems. This study aims to examine the influence of human resource (HR) capacity and the use of the Regional Government Information System (SIPD) on financial management performance. A quantitative approach was employed through a survey of 35 staff members involved in financial operations at the General Affairs Division of the Regional Secretariat of Malang Regency. The results of the study indicate that both Human Resources (HR) and the utilization of the Regional Government Information System (SIPD) have a positive and significant effect on financial management, with coefficient values of 0.617 (sig. 0.000) and 0.242 (sig. 0.045), respectively. These findings highlight the importance of enhancing employee competencies and optimizing information technology utilization to improve the effectiveness and accountability of regional financial management.

Keywords: Human Resources, SIPD, Local Finance, Governance, Linear Regression

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas menuntut dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten serta sistem informasi yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei terhadap 35 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM dan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, masing-masing dengan nilai koefisien 0,617 (sig. 0,000) dan 0,242 (sig. 0,045). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pegawai serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: SDM, SIPD, Keuangan Daerah, Tata Kelola, Regresi Linier

PENDAHULUAN

Salah satu komponen fundamental dalam tata kelola pemerintah dapat ditinjau dari pengelolaan keuangan yang baik. Keuangan wajib dikelola secara efektif, efisien, terbuka, serta akuntabel yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan tersebut bisa membantu daerah dalam menggapai tujuan pembangunan serta membagikan manfaat kepada masyarakat. Tetapi dalam realitasnya, masih banyak daerah yang mengalami bermacam permasalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti minimnya sumber energi manusia yang

bermutu serta minimnya pemanfaatan teknologi secara maksimal.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kompetensi personelnnya, di mana sumber daya manusia yang terampil meningkatkan pelaksanaan anggaran, akurasi pelaporan, dan kepatuhan peraturan, yang menjadikan pengembangan mereka penting untuk transparansi dan akuntabilitas.

SIPD meningkatkan efisiensi dan transparansi manajemen keuangan daerah dengan mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang meningkatkan

manajemen sumber daya, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, dan pelaporan, SIPD memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Diamanatkan oleh **(Permendagri No. 70 Tahun S2019)**, sistem ini mengkonsolidasikan data keuangan untuk meningkatkan aksesibilitas, pemahaman, dan auditabilitas. Sistem ini mengurangi risiko manipulasi data dan memastikan keakuratan laporan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan lebih efektif dan transparan.

Hasil riset menunjukkan, sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan SIPD menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan mendukung koordinasi yang lebih baik, penyusunan anggaran yang akurat, dan pelaporan yang transparan. **(Nurdin et al, 2024)** Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keandalan pelaporan keuangan, meminimalkan kesalahan dan menyederhanakan proses. Demikian pula, **(Teken et al., 2024)** menunjukkan bahwa SIPD menyederhanakan input data, meningkatkan estimasi anggaran, meningkatkan efektivitas biaya, dan meminimalkan penyalahgunaan dan perilaku oportunistik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan SIPD dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dengan fokus pada bagaimana faktor-faktor tersebut meningkatkan tata kelola keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif, data dikumpulkan melalui survei terhadap individu yang terlibat dalam

pengelolaan keuangan untuk mengeksplorasi hubungan antara teknologi, kemampuan SDM, dan efektivitas tata kelola keuangan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan keuangan publik merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam lingkup global, pengelolaan keuangan yang efektif harus memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Negara-negara maju telah lama menekankan pentingnya sistem keuangan yang terdigitalisasi dan aparatur yang kompeten agar pengelolaan anggaran dapat berjalan optimal.

Kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pemerintahan mengacu pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pegawai saat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sumber daya manusia juga memiliki kompetensi tinggi sangat penting dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses anggaran, pencatatan transaksi keuangan, dan pelaporan dilakukan dengan tingkat akurasi terbaik dan sepenuhnya mematuhi peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

(Isnaini & Saputra, 2024) Hal ini menggarisbawahi peran penting keahlian sumber daya manusia dalam memastikan pelaporan keuangan yang akurat, andal, dan patuh, menekankan pentingnya pengembangan berkelanjutan untuk mempertahankan standar tinggi dan integritas keuangan, sementara **(Muttaqien et al., 2024)** Kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan daerah, karena personel yang terampil memastikan proses keuangan yang akurat dan transparan, mematuhi peraturan, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab dalam mengelola dana publik.

Penelitian (**Septiani & Isnawaty, 2025**) menemukan bahwa penggunaan SIPD memiliki manfaat yang signifikan, seperti pengelolaan data yang terorganisir serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Studi lain oleh (**Mariana, 2024**) menunjukkan bahwa daerah yang menggunakan SIPD secara optimal mengalami penurunan tingkat kesalahan administrasi keuangan dibandingkan daerah yang masih menggunakan metode konvensional.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya pemerintah, yang menunjukkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penganggaran, alokasi, pengeluaran, dan pelaporan. Menurut (**Jaya Bahwiyanti, 2020**) kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja pengelolaan pemerintahan. Berdasarkan (**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022**) mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan berprinsip tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan. Studi (**Saputra et al., 2020**) menemukan bahwa daerah yang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan menunjukkan peningkatan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Studi

lainnya oleh (**Sunarya, 2021**) juga menemukan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi hubungan antara implementasi SIPD dengan LKPD.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan kajian pustaka di atas dan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- **H₁**: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- **H₂**: Pemanfaatan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- **H₃**: Kapasitas SDM dan pemanfaatan SIPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik dan regresi linier berganda untuk menguji dampak kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan SIPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta menawarkan wawasan berbasis data mengenai pengaruhnya. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran yang sistematis, hasil yang dapat diuji ulang, serta memberikan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan optimalisasi penggunaan SIPD guna meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menyoal karyawan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Dengan menggunakan purposive sampling,

dipilih 35 responden dengan peran seperti staf akuntansi, personel perbendaharaan, dan manajer anggaran. Pendekatan ini memastikan penelitian ini mengumpulkan data yang relevan dari individu yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Operasional Serta Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Independen

No	Variabel	Dimensi	Indikator (item)	Skala	Sumber
1.	SDM (X1)	Pengetahuan	Pemahaman tentang regulasi pengelolaan keuangan	Likert 1-5	Septiani & Isnawaty (2025)
			Pengetahuan teknis tentang penyusunan anggaran	Likert 1-5	
		Keterampilan	Kemampuan menggunakan aplikasi atau sistem keuangan	Likert 1-5	
			Ketelitian dalam menyusun laporan keuangan	Likert 1-5	
		Sikap	Tanggung jawab dalam menjalankan tugas keuangan	Likert 1-5	
Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas	Likert 1-5				

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner skala Likert sebanyak 10 pertanyaan. Responden menunjukkan tingkat persetujuan mereka terhadap berbagai pernyataan berdasarkan pengalaman pribadi, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju.” untuk mengumpulkan beragam persepsi individu tentang bagaimana kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan memengaruhi kinerja manajemen keuangan daerah.

No	Variabel	Dimensi	Indikator (item)	Skala	Sumber
1.	SIPD (X2)	Aksesibilitas dan Kemudahan Penggunaan	SIPD mudah diakses oleh seluruh pegawai yang membutuhkan	Likert 1-5	Mariana (2024)
			Proses input data ke dalam SIPD mudah dipahami	Likert 1-5	

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam konteks ini, Sumber daya manusia, termasuk keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam peran akuntansi atau administrasi, sangat penting untuk manajemen keuangan yang efektif, karena mereka memungkinkan penangan tugas yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat, memastikan hasil keuangan yang efisien.

Penggunaan SIPD

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengacu pada tingkat penggunaan sistem ini dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. SIPD dikembangkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam berbagai proses, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan, agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

	Fitur-fitur SIPD mendukung tugas perencanaan dan pelaporan	Likert 1–5
Integrasi dan Keterpaduan Data	SIPD menyatukan data dari berbagai bidang/unit secara otomatis	Likert 1–5
	SIPD membantu memperkecil kesalahan karena data yang sudah terhubung	Likert 1–5
	Penggunaan SIPD memperlancar koordinasi antardivisi	Likert 1–5
Transparansi dan Akuntabilitas	Data anggaran dan realisasi keuangan dapat dipantau secara terbuka	Likert 1–5
	Laporan yang dihasilkan melalui SIPD dapat dipertanggungjawabkan	Likert 1–5
	SIPD memudahkan audit internal maupun eksternal	Likert 1–5
	SIPD mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan	Likert 1–5

Penelitian ini menggunakan kuesioner 10 pertanyaan dengan skala Likert lima poin ("Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju") untuk menangkap persepsi individu peserta berdasarkan pengalaman pribadi mereka, memastikan pemahaman komprehensif tentang variabel yang dipelajari.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Variabel ini mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dapat memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Variabel Dependen Kinerja Pengelolaan Keuangan

No	Variabel	Dimensi	Indikator (item)	Skala	Sumber
1.	Pengelolaan Keuangan (Y)	Transparansi	Keterbukaan informasi keuangan kepada publik	Likert 1–5	Mariana (2024)
			Kemudahan akses laporan keuangan oleh pemangku kepentingan	Likert 1–5	
			Akurasi dan kejelasan data keuangan yang disediakan	Likert 1–5	
		Efisiensi	Kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan dan prioritas	Likert 1–5	
			Pengelolaan waktu dan sumber daya agar tidak terjadi pemborosan	Likert 1–5	
			Optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan untuk hasil maksimal	Likert 1–5	
		Akuntabilitas	Kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat	Likert 1–5	
			Keberadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran	Likert 1–5	

Responden menilai kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan pengalaman dan kondisi kerja mereka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang diteliti memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga memberikan wawasan tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dan efektivitas keuangan.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- **H1:** Kemampuan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- **H2:** Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam penganggaran, pelaporan, dan pengelolaan data.
- **H3:** SDM dan Pemanfaatan SIPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan

Bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pengelolaan Keuangan (Variabel Dependen)

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi untuk variabel SDM

b_2 = Koefisien regresi untuk variabel SIPD

X_1 = Kapasitas SDM

X_2 = Penggunaan SIPD

e = Error term

Pengujian secara simultan (Uji F)

Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah variabel-variabel independen secara kolektif memengaruhi variabel dependen, mengonfirmasi validitas model dan memastikan bahwa variabel-variabel yang dipilih memengaruhi hasil secara signifikan.

Dalam uji F, hipotesis yang diuji terdiri dari:

- Hipotesis Nol (H_0): Variabel independen, Ketika variabel independen dianalisis bersama-sama, koefisien regresi nol menunjukkan variabel tersebut tidak berdampak signifikan terhadap variabel dependen atau menjelaskan variasinya.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Secara bersamaan, setidaknya satu variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan, yang menunjukkan bahwa satu atau lebih variabel memainkan peran penting dalam menjelaskan variasi hasil dan berkontribusi terhadap daya prediksi model.

Statistik F mengevaluasi apakah variabel independen secara kolektif memengaruhi variabel dependen dalam model regresi. Nilai ini kemudian dievaluasi dengan membandingkannya dengan F-tabel atau menggunakan p-value. Jika p-value $< \alpha$ (0,05) atau F-statistik $>$ F-tabel, ini menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara

dua kelompok rata-rata signifikan secara statistik atau karena variasi acak. Uji ini menguji hipotesis nol (H_0) tentang tidak adanya perbedaan dan hipotesis alternatif (H_1) tentang perbedaan yang bermakna. Dengan menghitung p-value, uji t membantu menentukan signifikansi statistik, yang berperan dalam berbagai penelitian, seperti mengukur efektivitas kebijakan, membandingkan kinerja sebelum dan sesudah perlakuan, serta mengevaluasi dampak suatu program.

Suatu hasil dianggap signifikan jika nilai p kurang dari tingkat signifikansi yang dipilih (misalnya, $\alpha = 0,05$). Jika $p < 0,05$, hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan adanya perbedaan yang berarti antara kelompok-kelompok tersebut. Namun, jika $p \geq 0,05$, hipotesis nol tidak ditolak, yang menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati kemungkinan besar disebabkan oleh fluktuasi acak dan bukan efek yang berarti.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 35 pegawai Bagian Umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang yang dipilih karena keterlibatan langsung mereka dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan peran mereka dalam pengelolaan keuangan daerah.

Karakteristik responden yang diteliti meliputi:

1. Jabatan dan Tanggung Jawab:
 - Seluruh responden terlibat langsung dalam administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
 - Beberapa responden memiliki tugas tambahan seperti penyusunan anggaran dan laporan keuangan.
2. Pengalaman Kerja:
 - Responden memiliki pengalaman kerja yang bervariasi, dengan rata-rata bekerja di bidang pengelolaan keuangan daerah selama 3–10 tahun.

Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengevaluasi variabel kunci seperti kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan SIPD, dan efektivitas pengelolaan keuangan, memberikan gambaran umum sebagai berikut:

Table 1. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDM	35	30.00	50.00	43.3143	5.53476
SIPD	35	31.00	49.00	41.9714	5.47983
PENGELOLAAN KEUANGAN	35	31.00	50.00	43.4286	5.26523
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data *Output* SPSS, 2025
 Studi ini melibatkan 35 responden yang memberikan wawasan tentang tiga variabel kunci: Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil

dari analisis statistik deskriptif disajikan sebagai berikut: Variabel SDM menunjukkan rentang skor antara 30 hingga 50, dengan rata-rata sebesar 43,31 dan simpangan baku 5,53. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi

terhadap kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum berada pada kategori baik, meskipun terdapat variasi yang cukup lebar di antara responden. Variabel pemanfaatan SIPD memiliki skor minimum 31 dan maksimum 49, dengan rata-rata sebesar 41,97 dan simpangan baku 5,48. Ini mencerminkan bahwa pemanfaatan SIPD dinilai cukup tinggi oleh responden, namun dengan tingkat persepsi yang sedikit bervariasi. Sementara itu, variabel Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki rentang skor antara 31 hingga 50, dengan rata-rata sebesar 43,43 dan simpangan baku 5,27. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dipersepsikan baik dan relatif seragam. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap ketiga variabel berada dalam kategori positif, yang mencerminkan pandangan yang baik terhadap kapasitas

SDM, pemanfaatan SIPD, dan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan instansi.

Uji Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) Pemanfaatan SIPD (X_2) dan efek gabungannya terhadap kinerja Manajemen Keuangan (Y), dengan fokus pada bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi hasil pengelolaan keuangan daerah. Dengan menilai dampak masing-masing variabel independen, analisis ini memberikan wawasan untuk memandu keputusan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan penggunaan SIPD, yang pada akhirnya mendorong praktik manajemen keuangan yang lebih efektif.

Tabel 2. Estimasi Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.583	5.163		1.275	.211
	SDM	.617	.115	.648	5.379	.000
	SIPD	.242	.116	.251	2.087	.045

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN

Sumber: Data *Output* SPSS, 2025

Analisis regresi linier berganda menghasilkan terciptanya model regresi, yang direpresentasikan oleh persamaan berikut:

$$Y = 6,583 + 0,617X_1 + 0,242X_2$$

Interpretasi Hasil:

Variabel SDM memiliki koefisien regresi sebesar 0,617, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel SDM akan meningkatkan skor pengelolaan keuangan sebesar 0,617 poin, dengan asumsi variabel SIPD

tetap konstan. Nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari ambang batas 0,05, menegaskan bahwa SDM berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pengelolaan keuangan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan sikap SDM memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kinerja keuangan daerah.

Sementara itu, variabel SIPD memiliki koefisien regresi sebesar 0,242, yang

menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan SIPD akan menaikkan skor pengelolaan keuangan sebesar 0,242 poin, dengan asumsi SDM tetap konstan. Nilai signifikansi sebesar 0,045 juga menunjukkan bahwa pengaruh SIPD signifikan secara statistik meskipun relatif lebih kecil dibandingkan SDM. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa baik kapasitas sumber daya manusia maupun

pemanfaatan SIPD secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai dan optimalisasi sistem informasi pemerintahan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.795 ^a	.631	.608	3.29559

a. Predictors: (Constant), SIPD, SDM

Sumber: Data *Output* SPSS, 2025

Analisis regresi berganda menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,631, yang berarti bahwa variabel Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara bersama-sama mampu menjelaskan 63,1% variasi dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah. Persentase ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi yang cukup kuat dan signifikan dalam memengaruhi efektivitas manajemen keuangan.

Sementara itu, sisanya sebesar 36,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model, yang tidak diteliti

dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SDM dan SIPD berperan penting, terdapat faktor tambahan lain yang

juga berkontribusi terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas tata kelola keuangan daerah serta pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti regulasi, budaya organisasi, atau sistem pengawasan dalam analisis yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Pengujian Hipotesis

Pengujian secara simultan (F Test)

Tabel 4. Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	595.023	2	297.511	27.393	.000 ^b
	Residual	347.549	32	10.861		
	Total	942.571	34			

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN

b. Predictors: (Constant), SIPD, SDM

Sumber: Data Output SPSS, 2025
SDM dan SIPD dalam model ini, sedangkan

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa model regresi yang menghubungkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan pengelolaan keuangan signifikan secara statistik, dengan nilai F sebesar 27,393 dan nilai p sebesar 0,000. Karena nilai p berada di bawah ambang batas 0,05, hal ini menegaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari SDM dan SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Artinya, setidaknya salah satu dari variabel independen tersebut berkontribusi nyata dalam menjelaskan variasi kinerja pengelolaan keuangan.

Nilai Sum of Squares Regresi sebesar 595,023 mencerminkan total variasi dalam pengelolaan keuangan yang dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel

Residual Sum of Squares sebesar 347,549 menunjukkan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Hal ini sejalan dengan nilai R Square sebesar 0,631, yang berarti bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 63,1% variabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, hasil uji ANOVA ini mendukung hipotesis bahwa model regresi yang mencakup SDM dan SIPD layak digunakan dalam menjelaskan dan memprediksi kinerja pengelolaan keuangan, serta memiliki potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan pemerintahan daerah.

Pengujian secara parsial (t-test)**Tabel 5. Uji Parsial****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.583	5.163		1.275	.211
	SDM	.617	.115	.648	5.379	.000
	SIPD	.242	.116	.251	2.087	.045

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN

Sumber: Data Output SPSS, 2025

Hasil analisis pada Tabel 5 menghasilkan temuan sebagai berikut:

a. Uji terhadap Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,617, dapat disimpulkan bahwa peningkatan dalam kapasitas SDM secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Temuan ini mendukung hipotesis pertama dalam penelitian, yang menekankan pentingnya kompetensi dan profesionalisme SDM dalam menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel.

b. Uji terhadap Variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X2)

Variabel SIPD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045, yang juga berada di bawah ambang batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa SIPD berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan koefisien regresi sebesar 0,242, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam pemanfaatan dan integrasi SIPD berkontribusi terhadap meningkatnya efektivitas dan akurasi dalam pelaporan serta pengelolaan keuangan. Temuan ini mendukung hipotesis kedua, yang menegaskan bahwa keberadaan dan optimalisasi SIPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah adalah dengan menguatkan

kapasitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kompetensi SDM, yang meliputi pendidikan, pengalaman, dan pemahaman terhadap regulasi keuangan, terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penerapan SIPD secara sistematis meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui pencatatan data yang akurat dan penyederhanaan proses pelaporan, sehingga mengurangi kesalahan administratif dan memperkuat pengelolaan dana publik. Analisis regresi memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi SIPD secara signifikan berkontribusi terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan keterampilan pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi serta penerapan SIPD yang optimal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Saran

Saran Praktis

Pemerintah daerah hendaknya memprioritaskan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi berkala bagi pegawai di bidang pengelolaan keuangan. Program ini hendaknya difokuskan pada pemahaman regulasi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan keterampilan analisis data untuk memastikan pegawai mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan sesuai standar. Selain itu, pemanfaatan SIPD harus lebih

dioptimalkan dengan memberikan pelatihan teknis dan menyediakan panduan yang mudah diakses bagi pengguna sistem. Evaluasi terhadap implementasi SIPD juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, sistem pengawasan dan evaluasi kinerja harus diperkuat dengan menerapkan Key Performance Indicators (KPI) yang jelas dan melakukan audit internal secara berkala. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi dalam kondisi baik, termasuk jaringan internet dan perangkat keras, agar implementasi SIPD dapat berjalan optimal.

Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat diperluas dengan memasukkan variabel tambahan seperti budaya organisasi, motivasi karyawan, tingkat kepemimpinan, dan efektivitas pengawasan internal, yang dapat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penelitian di masa mendatang sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas sampel agar mencakup lebih banyak lembaga pemerintah daerah guna meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif seperti wawancara atau studi kasus dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini dapat membantu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, yang mengarah pada praktik tata kelola yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan

keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, 10(1).

<https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/17119/6446>

Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., & Waruwu, H. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research (JSR)*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>

Demeri, A. F. N., Amalia, A., Halim, H., & Daryati, Y. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah: Studi kasus di Kota Cirebon. *YUME: Journal of Management*, 8(2), 235–240. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/8679/5651>

Fajaruddin. (2021). Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 1, 659. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.395>

Fitriani, L., & Solikhin, A. (2024). Pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh teknologi informasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(5). <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilen, G., Utomo, M. N., & Ariani, A. (2025). Eksplorasi peran pengembangan kapasitas SDM sebagai moderator dalam hubungan keterampilan, kompetensi, dan profesionalisme terhadap kualitas pelayanan publik. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 27(2), 329–339. <https://doi.org/10.30872/jfor.v27i2.2576>
- Gitarisdiana, C., Rasaili, W., & Andiriyanto, A. (2024, Februari). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja*, 1(1). <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/3209/1949>
- Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, Roushandy Asri Ustiawaty, J., Utami, E. F., & Sukmana, Dhika Juliana Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hermawan, E., Suprayitno, D., Vikaliana, R., & Hermawan, R. (2022). *Buku ajar penelitian kuantitatif*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Isnaini, B. N., & Saputra, E. T. (2024). Pengaruh pengetahuan sumber daya manusia, implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan desa (Studi kasus pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo). *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(4), 215–228. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i4.844>
- Kamelia, K., Bulutoding, L., & Juardi, S. S. (2024). Akuntabilitas, transparansi, dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan etika sebagai variabel moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2>
- Karepouwan, C. A. (2025). The Role of Regional Government Information Systems (SIPD) in Increasing Financial Accountability and Transparency in Paniai Regency. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, 6(1), 11–20. <https://doi.org/10.37012/ileka.v6i1.2535>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mariana, L., & Pandoyo. (2024). Analisis implementasi sistem informasi pemerintahan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(2), 123–130. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4136>
- Musthafa, R. A. (2023). Pengaruh akuntabilitas, sistem pengendalian intern, transparansi, dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dan kinerja pengelolaan SKPD di

- Pemerintah Kota Banjarmasin. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 9(2), 222–236. <https://doi.org/10.35972/jieb.v9i2.1184>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nelawati, E., Suharto, S., & Mazni, A. (2023). Analisis kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.24127/simplex.v4i2.5003>
- Nurdin, E., Lestari, Y., Wahyuni, Z., & Idris, M. F. (2024). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 188–201. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v10i1>
- Paat, F. F., & Saleh, S. A. (2023). Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.35313/iarj.v4i1.5190>
- Pattipeilohy, A. (2020). *Manajemen pemerintahan: Teori dan praktik*. Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia. ISBN: 978-623-09-8621-5
- Permendagri No. 70 Tahun. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Permendagri Republik Nomor 70*, Nomor 65(879), 2004–2006.
- Putri, D. A., Alifah, T. N., & Purwaningrum, T. (2025). Evaluasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 110–118. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/1033>
- Putri, N., Afrizal, A., & Wahyudi, I. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)* (E-Journal), 8(3), 224–240. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i3.36369>
- Rezkiaty, A. H., Alam, S., & Tenriwaru. (2024). Evaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2), 464–478. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/7178>
- Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., Nirawana, I. W. S., &

- Legito. (2023). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(3), 156–170. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1.i03>
- Riyadi, S. (2019). *Sumber daya manusia sektor publik: Peran strategis dalam pelayanan publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/60881>
- Sijabat, J., Siringoringo, M. J. B., & Simanjuntak, G. F. R. (2024). Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan pada kantor DPRD kota. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 1169–1183. <https://doi.org/10.37531/mirai.v9i1.7402>
- Siregar, M. (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan kualitas anggaran terhadap kinerja keuangan daerah dimediasi dengan sistem informasi manajemen daerah. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 160–169. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.2240>
- Sukardi, S. (2021). *Statistika Terapan dan Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sutaryo, H. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Teken, I. K. A. G., & Putri, I. A. D. (2024). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Akuntansi*, 42(1), 537–556. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v42.i01.p08>
- Wahyuni, S., & Hidayat, R. (2022). *Panduan Praktis Analisis Data dengan SPSS untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.